

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023**

	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	2023	
			Target	Rp.
	Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	81	-
	Sasaran: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Level Maturitas SPIP	3	-
		Level Kapabilitas APIP	3	-
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	12,812,811,000
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100	57,120,000
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	3	10,200,000
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	1	3,060,000
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD tersusun	1	3,060,000
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1	5,100,000
e.	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	1	5,100,000
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen LKjIP tersusun	1	5,100,000

	g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	25,500,000
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan	100	8,981,895,000
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	54	8,851,295,000
	b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12	100,000,000
	c.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	12	5,100,000
	d.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun	12	5,100,000
	e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,100,000
	f.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	4	5,100,000
	g.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	16	5,100,000
	h.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	12	5,100,000
	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100	50,700,000
	a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	umlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	228	45,600,000
	b.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian	4	5,100,000
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat waktu	100	785,000,000

	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	210	51,000,000
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	3150	120,000,000
	c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	20	20,400,000
	d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik tersedia	450	20,000,000
	e.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia	66650	80,000,000
	f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	3624	12,000,000
	g.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	225	91,600,000
	h.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	380,000,000
	i.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	100	10,000,000
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	1,379,196,000
	a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2	650,000,000
	b.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	10	130,000,000
	c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	14	286,196,000
	d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15	313,000,000
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	745,400,000
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1300	20,400,000

	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	325,000,000
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	14	400,000,000
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	813,500,000
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	25	425,720,000
	b.	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel terpelihara	32	5,100,000
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	158	132,680,000
	d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ Terpelihara	1	250,000,000
II.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	100	179,550,000	
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	100	179,550,000	
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	100	179,550,000	
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	100	179,550,000	
		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus	100	569,777,000	
	8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100	887,177,000
	a.	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	jumlah laporan audit kinerja	8	56,100,000
	b.	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	jumlah laporan audit keuangan	8	55,257,000
	c.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan reviu Kinerja	58	150,000,000
	d.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan reviu keuangan	223	190,000,000
	e.	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Audit Desa	72	266,843,000
	f.	Kerjasama pengawasan internal	jumlah laporan kerjasama terlaksana	1	20,000,000

	g.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI/APIP	86	148,977,000
	9.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase aduan/kerugian daerah yang di tindaklanjuti	100	400,800,000
	a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2	40,800,000
	b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan audit tujuan tertentu	71	360,000,000
	III.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1	100	220,000,000
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2	100	220,000,000
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3	100	220,000,000
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4	100	220,000,000
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus	100	3,170,450,000
	10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	100	1,963,450,000
	a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang di tetapkan	5	863,450,000
	b.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	jumlah pengawas yang mendapatkan peningkatan kapasitas (orang)	54	1,100,000,000
	11	Pendampingan dan Asistensi	Nilai MCP Korsupgah KPK	68	2,307,000,000
	a.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pendampingan dan asistensi	50	1,000,000,000
	b.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	jumlah Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Pada Perangkat Daerah	51	247,000,000

c.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (dokumen)	15	750,000,000
d.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (dokumen)	8	310,000,000

Klaten, 10 Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH
KAB. KLATEN



JAJANG PRIHONO, S.STP.

Pembina Tingkat I

19810216 199912 1 001